

Banyak Pelanggaran Kampanye, Bawaslu: Kesadaran Hukum Masih Rendah

Jumat, 26 Oktober 2018 | 16:47 WIB



Foto: Zunita Putri/detikcom

Jakarta - Bawaslu mencatat banyak pelanggaran aturan kampanye. Salah satu penyebabnya karena kesadaran hukum peserta Pemilu rendah. "Pelanggaran itu bisa disebabkan karena kesadaran hukum peserta pemilu kita masih rendah. Ada kecenderungan untuk melakukan pelanggaran," ujar anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, saat dihubungi, Jumat (26/10/2018). Selain kurangnya kesadaran hukum, ketidaktahuan terkait aturan yang berlaku. Parpol punya peran melakukan pendidikan politik. Bawaslu juga ikut membantu dengan melakukan sosialisasi aturan kampanye secara berjenjang. "Partai politik punya peran besar untuk memberikan pendidikan politik. Memang Bawaslu tidak bisa menjangkau sampai semua level, walaupun secara berjenjang sosialisasi ini juga kami lakukan," kata Ratna. Bawaslu juga mengundang partai politik untuk mensosialisasikan aturan kampanye. Namun, dia menduga sosialisasi ini belum sampai pada tingkat daerah. "Di level pusat, undangan-undangan yang menyertakan parpol juga banyak dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Mungkin hasil sosialisasi ini yang tidak tersampaikan ke daerah," tuturnya. Bawaslu merekap jumlah laporan dugaan pelanggaran yang masuk selama masa kampanye. Tercatat ada 309 dugaan pelanggaran yang diterima Bawaslu. Berdasarkan data Bawaslu, jumlah dugaan pelanggaran pemilu pada masa tahapan kampanye sebanyak 309. Terdiri dari 199 temuan dan 110 laporan. Pelanggaran pemilu berdasarkan jenisnya terdiri dari, administrasi 128, pelanggaran hukum lainnya 35, pelanggaran etik 26, pelanggaran ASN 15, pelanggaran pidana 13, sedang dalam penanganan 39, bukan pelanggaran 53. Sedangkan subyek yang dilaporkan terdiri dari, peserta pemilu 134, WNI dan tim kampanye 54, penyelenggara 30, pejabat 23, ASN 15 orang.